

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat
Project Title:	Revitalization of Local Wisdom for Sustainable Management of Natural Resources in Buano Island, Indonesia
Grant Number:	66589
CEPF Region:	Wallacea
Strategic Direction:	4 Strengthen community-based action to protect marine species and sites
Grant Amount:	\$95,640.00
Project Dates:	June 01, 2017 - October 31, 2019
Date of Report:	December 24, 2019

IMPLEMENTATION PARTNERS

List each partner and explain how they were involved with the project.

- 1. Soa, yang terlibat langsung dalam penengembangan DPL serta mengadvokasi aturan Soa dengan Kepala Dati dan masyarakat Soa.**
- 2. Pemerintah Negeri di Pulau , mengembangkan aturan Negeri, mengalokasikan dukungan pengawasan bagi kewang.**
- 3. DKP Maluku, berperan sebagai Pendamping teknis sekaligus mendorong mengintegrasikan daerah perlindungan laut ke dalam KKP Pulau Buano.**
- 4. DLH SBB, membantu dalam mendukung upaya restorasi hutan mangrove.**
- 5. BAPPEDA, asistensi pengembangan strategi pengelolaan pulau Buano dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan daerah SBB (Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)**
- 6. BARISTAND, dalam proyek ini membantu LPPM dalam pengembangan, pelatihan penyulingan ramah lingkungan dan membuka akses pasar**
- 7. Kehutanan Universitas Pattimura, memberikan pendampingan teknis untuk 1) melakukan pemetaan wilayah adat; 2) pengembangan strategi pengelolaan Pulau Buano**
- 8. CTC, berperan untuk 1) menyediakan informasi dan data status serta potensi keanekaragaman hayati bawah laut untuk DPL dan pengembangan strategi pengelolaan Pulau Buano secara berkelanjutan; 2) Memberikan dukungan teknis dalam penilaian kesesuaian (analisa Marxan) dalam penentuan DPL; 3) Membantu mengintegrasikan DPL kedalam KKP Pulau Buano**

CONSERVATION IMPACTS

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile.

Hasil atau dampak program revitalisasi dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu spesies, tapak dan komunitas. Secara umum dampak program pada ketiga tingkatan tersebut sebagai berikut:

Di tingkat Spesies

- 1. Ancaman terhadap spesies Terumbu karang, Dugong, Penyu, Mangrove, Kehicap Buano berkurang**
- 2. Berkurangnya ancaman terlihat dengan 1) *Penyu*, tidak ditemukan lagi penangkapan, konsumsi ataupun perdagangan penyu dan telurnya; 2) *Terumbu karang*, Penangkapan ikan destruktif tidak lagi ditemukan; 3) *Mangrove*, penebangan mangrove untuk kayu bakar berkurang**
- 3. Untuk habitat Kehicap dilindungi oleh Soa, karena kehicap juga merupakan hewan yang dikeramatkan oleh Soa Ety (Soa pemilik wilayah kehicap sering terlihat).**

Di tingkat tapak

- 1. Daerah perlindungan laut, dari sebelumnya tidak ada meningkat menjadi 253 ha di tahun 2019**
- 2. Kesadaran untuk memperluas wilayah perlindungan adat meningkat: dari tidak ada menjadi a) 1 kawasan keramat di darat dan 1 di pesisir; b) 3 kawasan hutan mangrove (190 ha); c) Pesisir pantai sepanjang 13,5 km**

Ditingkat Komunitas

- 1. Peningkatan kapasitas mendorong terjadi revitalisasi peran dan fungsi Institusi serta pejabat adat, seperti Kewang, Kepala Soa, Kepala Dati**
- 2. Aturan Soa dan peraturan negeri tentang pengelolaan wilayah ulayat berkelanjutan tersedia**
- 3. Ada lokasi DD/ADD bagi kewang**
- 4. Rencana strategi pegeolaan Pulau Buano menjadi dokumen perbandingan/rujukan dalam perencanaan pembangunan di tingkat negeri.**
- 5. Kesadaran meningkat, aktivitas penangkapan ikan yang merusak, penambangan karang dan pasir serta penebangan kayu berkurang**

Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Forest and Coastal Zone of Buano Island are sustainably managed through the implementation of natural resources management based on traditional values	Meningkatnya kapasitas intitusi dan pejabat adat, pemerintah negeri dan masyarakat berkontribusi positif dalam perlindungan dna pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Buano. Aturan-Aturan Soa dan peraturan negeri yang dibuat menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembentukan kawasan lindung di hutan dan di pesisir memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pelestarian habitat yang dilindungi seperti burung kehicap, terumbu karang, penyu dan mangrove.

Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
(1) Agreement on natural resource management in Buano Island based on local Wisdom through the arrangement and control of Soa 9 each North Buano 5 Soa and South Buano 4 Soa village on the island Buano (North Buano Village and South Buano Village)	Meningkatnya kapasitas intitusi dan pejabat adat, pemerintah negeri dan masyarakat berkontribusi positif dalam perlindungan dna pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Buano. Aturan-Aturan Soa dan peraturan negeri yang dibuat menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembentukan kawasan lindung di

	hutan dan di pesisir memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pelestarian habitat yang dilindungi seperti burung kehicap, terumbu karang, penyu dan mangrove.
(2) 3 MPAs covering 20 ha in Buano Island waters are determined through local agreement with management plan.	Sebanyak 3 daerah perlindungan laut (DPL) seluas 225 ha berhasil dibentuk selama masa pelaksanaan program. 3 DPL yang berada di Desa Buano Utara diperkuat dengan Peraturan Negeri tentang Perlindungan Kawasan Pesisir yang telah ditetapkan pada 5 Oktober 2019 Dengan adanya DPL penangkapan ikan secara merusak dengan menggunakan Bom, potasium, tidak lagi ada. Perburuan dan konsumsi telur dan daging penyu sudah tidak ada. Kewang laut secara teratur melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di wilayah DPL
(3) 1 MPA Managing group is formed and strengthened capacity and involved in joint learning between the marine conservation management group in Maluku,	Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal telah mendorong Kewang mulai menjalankan fungsi pengawasannya, LPPM tidak lagi membentuk kelompok pengawas. Selain itu, dengan adanya KKP Pulau Buano, LPPM telah mendorong dan mengintegrasikan Kewang dalam kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibentuk oleh DKP melalui CTC (Sea Project)
(4) Integration of 3 MPAs of Buano Island into Maluku Province Marine Conservation Area and Village Mid Term Development Plan (RPJMDes)	5 DPL (2 DPL dibentuk tahun 2016, 3 DPL tahun 2018) telah berhasil diintegrasikan kedalam KKP Pulau Buano. 5 DPL telah dicadangkan sebagai zona inti. Di tingkat desa pengelolaan DPL baru dapat dilakukan melalui rencana kerja program dan anggaran pemerintah negeri.
(5) Improved management of Buano Island terrestrial forest area / key biodiversity area	Pembentukan dan pengawasan DPL secara telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan pesisir. Sedangkan kawasan hutan, meskipun belum ada skema perlindungan formal oleh Pemerintah (KEE), namun keberadaan aturan soa tentang pemanfaatan kayu telah mampu menekan logging tradisional tanpa ijin disekitar hutan mangrove, wilayah kehicap dan sumber air

Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives.

Keberhasilan:

- **Pengarusutamaan Kehicap sebagai spesies karismatik Buano, mendorong rasa kepemilikan masyarakat dan kesadaran untuk melindunginya.**
- **Pemetaan aktor secara komprehensif mulai dari kelompok yang paling kecil seperti marga, hingga Soa dan pemerintah negeri**
- **Penguatan kapasitas institusi dan pejabat adat**
- **Pembentukan wilayah perlindungan dimulai dari komunitas adat, sebagai pemilik petuanan dan pengembangan wilayah perlindungan dilakukan secara partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat**
- **Isu yang dibawakan cukup mewakili permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat**
- **Membuka dan selalu *update* informasi terkini yang relevan dengan situasi Pulau Buano baik ditingkat regional dan global serta dampaknya secara positif dan negatif dengan pemangku kepentingan**

Tantangan:

- **Masyarakat lambat memahami maksud dan tujuan proyek, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun kepercayaan di masyarakat**
- **Konflik kepentingan tinggi. Tidak ada figur yang mampu mempengaruhi seluruh masyarakat Pulau Buano**

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Selama pelaksanaan program, LPPM ada capaian-capaian lain yang sebelumnya tidak terencanakan, seperti:

- 1. Pemetaan Wilayah adat berbasis Soa. Sejatinya Pemetaan wilayah direncanakan untuk melihat potensi sumber daya alam di kedua lokasi implementasi program. Namun karena berpotensi konflik, maka berdasarkan masukan dari pimpinan adat maka pemetaan dilakukan untuk memetakan potensi dan batas wilayah berbasis soa**
- 2. Pelaksanaan program menyediakan ruang-ruang konsolidasi dan rekonsiliasi antara dua negeri yang sebelumnya bertikai bahkan jauh sebelum terjadinya konflik kemanusiaan di Maluku**
- 3. Dokumen Strategi pengelolaan Pulau Buano menjadi rujukan dalam peninjauan dokumen perencanaan pembangunan ditingkat kabupaten seperti RTRW dan RPJMD Kab. SBB.**
- 4. Burung Kehicap dan Hutan mangrove diusulkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh Dinas Kehutanan dan BKSDA**

PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	1. Strengthening Institutions and institutional customs of Buano Island	1.1	Custom Leadership training and Kewang training for conservation Reports	<p>Lokakarya bagi kepala Soa telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Oktober 2017 dan diikuti oleh 19 orang, berlokasi di Pulau Osi. Lokakarya difokuskan untuk menggali kekuatan dan tangenan serta nilai-nilai kearifan lokal yang asih tumbuh maupun yang sudah hilang terkait dengan praktek pelestarian lingkungan di Pulau Buano. Lokakarya berhasil memecahkan kebisuhan antara Buano Utara dan Buano Selatan dalam membicarakan batas wilayah adat. Bahkan menjadi awal mula proses revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal di Buano Selatan dan Buano Utara, terutama dalam pengaktifan kembali kewang di kedua desa yang diikuti oleh Pelatihan pengawasan sumber daya alam kepada Kewang.</p> <p>Pelatihan pengawasan sumber daya alam terlaksana pada tanggal 21-23 November 2017 dan diikuti oleh 20 orang terdiri 18 orang Kewang dari 9 soa dan 2 orang perwakilan dari unsur pemerintah desa saniri/BPD. Pelatihan ini berlangsung di ruang belajar PKBM Puan Mandiri Desa Buano Utara. 3 tema utama yang dibahas dalam pelatihan ini adalah konsep kewang, mengenal keanekaragaman hayati di laut dan pesisir Buano serta penilaian status kelembagaan kewang di Buano.</p>
1	1. Strengthening Institutions and institutional customs of Buano Island	1.2	Custom community structure, the elaboration of roles and functions of traditional institutions Buano Island	<p>Dimulai dari melakukan pendokumentasian nilai kearifan lokal LPPM mendapatkan gambaran tentang status struktur, peran dan fungsi institusi maupun pejabat adat di Pulau Buano. Pendampingan intensif kepada pimpinan dan pejabat adat, telah berhasil merevitalisasi fungsi dan peran adat untuk pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu 1) Penetapan kewang di Buano Selatan; 2) Pengawasan oleh Kewang; 3) Pengembangan daerah perlindungan; dan 5) Pengawasan Partisipatif bersama masyarakat. Pemetaan batas wilayah adat mendorong terjadi perubahan pola pikir masyarakat terutama dalam isu tenurial. Isu tenurial tidak terbatas hanya pada klaim kepemilikan wilayah, tetapi upaya untuk rehabilitasi dan pelestarian kehati.</p>
1	1. Strengthening Institutions	1.3	Documentati on of half year	<p>Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Tengah Program Bersama Pemerintah Kabupaten SBB terlaksana pada tanggal 18 Oktober 2018 di Ruang</p>

	and institutional customs of Buano Island		coordination and consultation program with SBB Districts Government	<p>Pertemuan Bupati SBB. Pertemuan dihadiri oleh 29 orang, terdiri dari: OPD Teknis, Perwakilan Pemerintah Negeri, dan Praktisi.</p> <p>Kesepakatan yang berhasil dibangun dalam pertemuan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah mendukung upaya melestarikan sumber daya alam di pulau kecil dan single site species Kehicap Buano. 2. Menegaskan bahwa rencana pembangunan jalan lingkaran Pulau Buano tidak boleh mengganggu habitat Burung Kehicap Pulau Buano. 3. Pemerintah Kecamatan memberikan pendampingan dan memastikan dalam penyusunan DD/ADD dapat memastikan program-program kerja Negeri Buano tidak berdampak pada kerusakan ekosistem Pulau Buano, seperti dukungan bagi UMK Penyulingan Minyak kayu putih dan Talud penahan ombak 4. Dinas teknis terkait dalam memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintah negeri dapat juga mendukung upaya revitalisasi kearifan local di Pulau Buano, misalnya melalui dukungan POKMASWAS dan SISWASMAS 5. Pemerintah Kab. SBB dan LPPM bersama memperkuat kapasitas pemerintah negeri dan institusi adat agar nilai-nilai kearifan local dapat kembali hidup dan menguat di masyarakat.
2	2. Buano Island Natural Resource Participatory Mapping	2.1	Participatory Mapping of natural resources Training report	<p>Pelatihan terlaksana pada tanggal 05 – 06 Desember 2017 dan berlangsung di PKBM Puan Mandiri desa Buano. Peserta pelatihan ini adalah 13 orang kewan yang berasal dari tiap Soa yang juga tergabung dalam Tim Pemetaan Batas Wilayah adat. Keterlibatan kewan dirasa cukup membantu mereka juga dalam melakukan pengawasan ulayat. Fasilitator Pelatihan adalah Staf pengajar pada Fakultas Kehutanan Universitas Pattimura yang juga GIS Specialist.</p> <p>an kebijakan internal LPPM dengan melihat keb</p> <p>Pelatihan pemetaan ini fokus pada pemetaan teresterial. Pemetaan akan lebih spesifik untuk memetakan potensi, daerah keramat, wilayah-wilayah pemanfaatan hutan dan pesisir. Paska pelatihan, Kewan bersama Kepala Dati dan Kepala Soa menyusun rencana tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewan bersama kepala Soa melakukan pengambilan titik koordinat batas Soa 2. Melaporkan hasil pemetaan soa kepada kepala-kepala dati dan Pemerintah negeri 3. Meaggendakan pertemuan verifikasi peta Soa, antar Soa dan Negeri

2	2. Buano Island Natural Resource Participatory Mapping	2.2	Draft of Water and Buano Island Management plan	<p>Penyusunan dokumen ini dimulai dengan melakukan pemetaan partisipatif Pulau Buano. Awalnya pemetaan ditujukan untuk memetakan batas wilayah Buano Utara dan Buano Selatan beserta potensi yang terkandung didalamnya. Namun mengingat potenis konflik yang cukup besar, maka atas saran para tetua adat di Pulau Buano Pemetaan dilakukan berbasis wilayah Soa. Pemetaan berlangsung selama kurang leboh 3 bulan dan hasil pemetaan dituangkan kedalam 10 peta tematik, yaitu potensi hutan dan pesisir, tutupan lahan, wilayah pemanfaatan dan kawasan keramat.</p> <p>Tahapan selanjutnya adalah Hasil pemetaan dikembangkan menjadi dokumen strategi pengelolaan Pulau Buano. Untuk melengkapi informasi dan data terkait Pulau Buano, LPPM telah memfasilitasi 2x workshop pengumpulan data yang melibatkan berbagai stakeholder masyarakat dan pemerintah. LPPM juga mendapat bantuan dari CTC dan WWF terkait data ekologis dan potensi perikanan Pulau Buano. Guna mengkonsolidasi, ekstrasi data dan penulisan maka dibentuk Tim Penulis Strategi Pengelolaan Pulau Buano yang beranggotakan 3 orang terdiri dari peneliti dan akademisi.</p> <p>Dookumen stratgei pengelolaan Pulau Buano selanjutnya dikonsultasikan dengan PEMDA Kab. SBB. PEMDA memebrikan apresiasi atas dokumen ini dan akan menggunakannya dalam mereview dokumen RTRW dan RPJMD</p>
2	2. Buano Island Natural Resource Participatory Mapping	2.3	Buano practical guide for community to manage natural resource based on Community in Buano Island	<p>Aktivitas ini tidak terlaksana karena keterbatasan sumber daya (manusia dan waktu)</p>
3	3. Strengthening and establishment Marine Protected Area.	3.1	Indigenous agreement about Buano Island MPA	<p>Sebanyak 5 daerah perlindungan laut (DPL) seluas 253 ha berhasil dibentuk selama masa pelaksanaan program. 3 DPL yang berada di Desa Buano Utara diperkuat dengan Peraturan Negeri tentang Perlindungan Kawasan Pesisir yang telah ditetapkan pada 18 September 2019</p> <p>Sedangkan 2 DPL di Buano Selatan telah diperkuat dalam rancangan peraturan negeri. Sampai berakhirnya masa pelaksanaan program, ranperneg</p>

				ini belum ditetapkan karena Buano Selatan belum memiliki kepala desa/raja definitif. Namun demikian 1 Soa telah membuat aturan Soa tentang DPL dimaksud.
3	3. Strengthening and establishment Marine Protected Area.	3.2	The technical report "Identification and Designation Buano Island MPA (including draft regulation consultation) "	3 dokumen Identifikasi DPL berhasil didokumentasikan, masing-masing di Soa Sinohi, Soa Sea dan Nuru Naini. Identifikasi lokasi DPL dilakukan bersama Kepala Soa dan Kewang. Identifikasi tidak hanya untuk memastikan lokasi, namun juga luasan dan batas DPL. Hasil identifikasi kemudian diintegrasikan kedalam Peraturan Negeri/Ranperneg di masing-masing Desa. Di tahun 2016, melalui hibah small grant LPPM mendampingi pemerintah negeri untuk mengembangkan dan menyerahkan peraturan negeri tentang perlindungan kawasan pesisir. Di tahun Februari 2019 aturan ini dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten SBB. Konsultasi ranperneg dihadiri oleh Raja, Kepala-kepala Soa dimana DPL berada dan perwakilan Saniri (Badan Perencanaan Desa).
3	3. Strengthening and establishment Marine Protected Area.	3.3	Report of Monitoring and Management MPA Buano by community groups in North and South Buano"	Canceled
3	3. Strengthening and establishment Marine Protected Area.	3.4	The technical report of Institutionalization 3 MPA into marine conservation area and Policy/Program Development " for example development planing in village, district and provincial	Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku, perairan Pulau Buano dialokasikan menjadi KKP Pulau Buano, dalam pengembangan KKP Pemda provinsi dibantu oleh USAID SEA Project dengan pelaksana lapangannya adalah CTC. Sejak awal CTC bekerja, LPPM telah berkoordinasi intens dengan CTC untuk dapat mengintegrasikan DPL-DPL di Pulau Buano kedalam KKP sebagai zona inti. Untuk memastikan DPL-DPL ini memenuhi kriteria sebagai zona inti, maka LPPM meminta CTC untuk melakukan penilaian dengan metode marxan pada DPL-DPL dimaksud. Dan hasil menunjukkan bahwa DPL-DPL yang ada memenuhi kriteria sebagai zona inti. Karena itu dalam penyusunan rencana pengelolaan zonasi (RPZ) KKP, 4 DPL ini juga telah dicadangkan sebagai zona inti dan 1 DPL sebagai zona rehabilitasi. Hanya saja sampai laporan ini dibuat konsultasi publik terkait RPZ belum

				dilaksanakan oleh CTC dan DKP Provinsi Maluku
4	4. Livelihood Support for the community to managed natural resources	4.1	Potential and Opportunities Assessment of Alternative Livelihoods in Buano Report	Satu survey sosial dan ekonomi telah dilaksanakan pada September 2017 untuk melihat situasi sosial dan ekonomi masyarakat di Pulau Buano. Survey ini melibatkan sebanyak 353 orang responden. Berdasarkan hasil survey, maka mata pencaharian alternatif yang dapat dikembangkan antara lain pengembangan tanaman lokal, pengembangan sayur organik dengan pemanfaatan lahan tepian, penyulingan kayu putih ramah lingkungan, budidaya perikanan dan pengembangan perikanan tangkap.
4	4. Livelihood Support for the community to managed natural resources	4.2	The technical report "Capacity Development Sustainable Livelihoods for Community "	<p>Aktivitas ini dilakukan melalui: pelatihan permakultur dan Pengembangan penyulingan minyak kayu putih ramah lingkungan. Pelatihan permakultur dilaksanakan pada 7-10 April dan diikuti oleh 20 orang peserta. Bibit dan pendampingan diberikan selama dan paska pelatihan. Namun karena kemarau panjang dan kelangkaan air bersih maka banyak kebun yang gagal panen. Meskipun gagal namun peserta tidak menyerah, 3 dari 20 orang peserta menggunakan bibit yang disediakan program untuk mengisi kebun sayurnya di hutan.</p> <p>Sedangkan untuk penyulingan kayu putih ramah lingkungan program menyediakan 2 unit ketel stensilis dan pendingin bagi 2 kelompok. Di Buano Utara dan Buano Selatan dibentuk 1 kelompok untuk mengelolanya. Penggunaan ketel stensilis berhasil meningkatkan kualitas, efisien dalam penggunaan kayu bakar dan efektifkan waktu produksi. Meskipun demikian kendala utama dalam penggunaan ketel ini adalah kebutuhan air yang cukup banyak, dan ini sangat menyulitkan pengusaha untuk dapat terus melakukan produksi di musim kemarau.</p>
5	5. Education and awareness	5.1	The technical report "Breeding, Planting and Maintenance Demo-plots Mangrove Forest Restoration"	LPPM telah berhasil melakukan 2x aksi pembibitan dan penanaman mangrove di Dusun Huhua desa Buano Utara bersama dengan melibatkan Kelompok Pramuka, dan di dusun Huaroa desa Buano Selatan bersama-sama dengan pelajar Dusun Huaroa dan kelompok pemuda Gereja (AMGPM Talitakum). Dari dua kegiatan diatas, berhasil disemai 2.418 bibit mangrove, sedangkan jumlah anakan mangrove yang berhasil ditanam sebanyak 1574 buah (754 di Huaroa dan 1000 di Dusun Huhua). Sebanyak 244 anakan rusak, karena hama kepiting dan kualitas propagule. Untuk Selanjutnya untuk perawatan ditangani langsung oleh Pemuda Dusun Huaroa dan

				<p>AMGPM Talitakum sertadibawah pengawasan Kepala Dusun dan Kewang</p> <p>Aksi restorasi mangrove telah menjadi agenda kerja tahunan AMGPM dan Kewang di Buano Selatan. Pasca kegiatan bersama yang dimotori LPPM, Kelompok pemuda gereja ini telah berhasil menginisiasi 2xpenanaman mangrove di sekitar negeri Buano Selatan.</p>
5	5. Education and awareness	5.2	Technical reports "Planning, implementin g and Village Sanitation Maintenance"	<p>Selama periode program LPPM telah melaksanakan setidaknya 4x aksi bersih-bersih lingkungan bersama komponeen masyarakat dan pemuda. Aksi bersih lingkungan diorganisir langsung oleh Majelis Gereja dan AMGPM di bersama masyarakat di Buano Selatan dan di Buano Utara dikoordinir oleh Kepala Soa, Puskesmas Pulau Buano dan pelajar SD/SMP. Puskesmas Buano merasa sangat terbantu dengan aksi bersih lingkungan ini, karena perilaku masyarakat yang belum hidup sehat dan bersih. Sampah masih dibuang dilaut dan telaga, karena belum ada sistem pengolahan sampah terpadu. Di Buano Selatan paska aksi bersih lingkungan AMGPM bersama masyarakat telah mengagendakan aksi bakti lingkungan dalam rencana kerja jemaat Pulau Buano.</p> <p>LPPM telah berkoordinasi dengan Pemda SBB untuk membantu mengembangkan tempat pengolahan sampah di Pulau Buano dan PEMDA SBB telah menyetujuinya, hanya saja terkendala pada hibah lahan oleh masyarakat Pulau Buano. Karenanya sampah yang berhasil dikumpulkan dalam aksi ini kemudian dikeringkan dan dibakar.</p>
5	5. Education and awareness	5.3	Sets Reporting of reflection and participatory evaluation	<p>Terlaksana 1x pertemuan refleksi evaluasi program, pada tanggal 25 September 2019, dihadiri 25 orang peserta. Masyarakat menganggap program telah mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melindungi sumber daya alamnya. Aktivitas pengrusakan dikawasan pesisir berkurang dan kewang berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>Hasil pertemuan refleksi kemudian digunakan untuk mengembangkan media pendidikan konservasi. Berdasarkan karakteristik masyarakat Pulau Buano maka media yang direkomendasikan adalah membuat lagu, teater jalanan dan komik poster. Hasilnya ada 2 lagu yang diaransemen ulang dan direkam untuk didistribusikan ke masyarakat. Selain itu LPPM menggandeng komunitas seni bengkel sastra melatih dan mendampingi pelajar melakukan pentas teater. LPPM juga telah cetak 600 ex. Poster komik dan mendistribusikannya kepada masyarakat.</p>

				1x pertemuan refleksi bersama tim pelaksana program terlaksana. Staf Pelaksana Program merasakan tertingkat kapasitas serta ketrampilan mengorganisir komunitas. Ditingkat lembaga terjadi peningkatan kapasitas, jaringan dan memperkuat reputasi lembaga. Namun Lembaga masih diperhadapkan dengan isu legalitas lembaga dan turn over staf yang cukup tinggi yang sangat mempengaruhi keberlangsungan lembaga kedepan.
6	Compliance with CEPF safeguards	6.1	Report on CEPF social assessment (indigenous people safeguard)	<p>Telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan Selama pelaksanaan program ada satu pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, yaitu:</p> <p>Keberatan kaum muda atas hasil pemetaan wilayah adat dan meminta klarifikasi atas hasil-hasil kerja LPPM. Kedua keluhan ini disampaikan oleh kaum muda (pemuda, pelajar) Buano yang berdomisili di Ambon. Keluhan disampaikan langsung kepada Direktur dan Koordinator Program di kantor LPPM di Ambon. Menanggapi keluhan ini maka dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kaum muda untuk memfasilitasi pertemuan antara LPPM dan organisasi kaum muda Buano di yang berada di Ambon untuk menyampaikan maksud, tujuan serta capaian program. Hasilnya mereka memahami kerja-kerja LPPM di Buano dan berkomitmen untuk mendukung LPPM dalam kerja-kerja selanjutnya di Buano 2. Bertemu dan berdiskusi dengan Pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di Pulau Buano dan menyampaikan keluhan dari kaum muda dan meminta pemangku kepentingan untuk memeberikan pandangan atas situasi ini. Hasilnya pemangku kepentingan merasa mereka yang menyamapikan keluhan adalah anak-anak muda yang hanya ingin mencari popularitas semata. Menurut para pemangku kepentingan ini keberadaan LPPM di Buano telah banyak membantu pemerintah negeri dan masyarakat disana.
6	Compliance with CEPF safeguards	6.2	Report on CEPF process framework (involuntary restriction on access to resources safeguard)	<p>Telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan Selama pelaksanaan program ada satu pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, yaitu:</p> <p>Keberatan kaum muda atas hasil pemetaan wilayah adat dan meminta klarifikasi atas hasil-hasil kerja LPPM. Kedua keluhan ini disampaikan oleh kaum muda (pemuda, pelajar) Buano yang berdomisili di Ambon. Keluhan disampaikan langsung kepada Direktur dan Koordinator Program di kantor LPPM di Ambon. Menanggapi keluhan ini maka dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kaum muda untuk memfasilitasi pertemuan antara LPPM dan organisasi kaum

				<p>muda Buano di yang berada di Ambon untuk menyampaikan maksud, tujuan serta capaian program. Hasilnya mereka memahami kerja-kerja LPPM di Buano dan berkomitmen untuk mendukung LPPM dalam kerja-kerja selanjutnya di Buano</p> <p>2. Bertemu dan berdiskusi dengan Pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di Pulau Buano dan menyampaikan keluhan dari kaum muda dan meminta pemangku kepentingan untuk memeberikan pandangan atas situasi ini. Hasilnya pemangku kepentingan merasa mereka yang menyamapikan keluhan adalah anak-anak muda yang hanya ingin mencari popularitas semata. Menurut para pemangku kepentingan ini keberadaan LPPM di Buano telah banyak membantu pemerintah negeri dan masyarakat disana.</p>
7	Capacity building of LPPM Maluku	7.1	Documentati on capacity building of LPPM institutional in the CEPF Civil Society Tracking Tools.	<p>Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan mengisi CSTT. Melalui program ini penataan dna penguatan kelembagaan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan audit lembaga, Audit dilakukan oleh KAP Gabriel Kroon yang berkedudukan di Jakarta. Audit dilakukan terhadap laporan keuangan tahun 2018 2. Membuat akta perubahan LPPM, proses ini dimulai dengan bertemu dengan pendiri dan mendiskusikan arah dan keberlanjutan LPPM. Sejak berdiri tahun 1994 LPPM telah mengalami 3x periode kepemimpinan, namun belum pernah dilakukan perubahan akta pengurus. Karenanya pada Juli 2019, dilakukan diskusi dengna Pendiri untuk menentukan Badan Pembina, pengawas dan pengurus LPPM guna memproses perubahan akta kepengurusan dan mendaftarkan LPPM ke kementerian Hukum dan HAM. 3. Mereview pedoman keuangan LPPM, Pada Juli 2019 seluruh staf LPPMberkumpul dan bersama-sama meninjau ulang pedoman keuangan lembaga. Proses ini dipimpin langsung oleh senior staf LPPM. 4. Mengembangkan rencana strategi LPPM 2020 – 2025, aktivitas ini diulai dengan pertemuan Pra Raker dengan agenda mereview Visi Misi LPPM dan mengkaji perubahan-perubahan baik dilingkup eksternal dan internal LPPM. Selanjutnya hasil ini dikembangkan menjadi rencana strtegis dan rencana aksi lembaga
1	1. Strengthening Institutions and	1.4	The technical report "Socialization of natural	<p>Pada awal Maret 2018, 8 dari 9 Soa berhasil membuat aturan Soa tentang perlindungan wilayah ulayat. Aturna ini mengatur tentang tata cara pemanfaatan kawasan hutan dan laut serta</p>

	institutional customs of Buano Island		resources customary rules to the community and monitoring implementation by Kewang"	pendapatan Soa. Aturan Soa dikembangkan bersama oleh pimpinan Soa dan anak Soa dalam Saniri Soa yang dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ masyarakat Soa, sehingga tidak diperlukan pertemuan khusus untuk mensosialisasikan aturan-aturan ini. Di Nuru Naini dan Nuru Na'ani aturan Soa disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemasangan tanda-tanda larangan disepanjang pesisir pantai dan hutan. Dalam melakukan aktifitasnya kewang terus berkoordinasi bersama kepala soa, jika terjadi pelanggaran maka ditindaklanjuti dengan pembinaan bersama kepala soa. Untuk mendukung Pengawasan di kedua negeri, Pemerintah Negeri memberikan insentif kepada Kewang (anggaran bersumber dari DD/ADD). Aktivitas yang pemanfaatan alam merusak yang dilakukan masyarakat di dalam/luar Pulau Buano ditindak oleh Kewang. Kasus yang berhasil ditangani diantaranya penangkapan ikan tanpa ijin (pencurian hasil laut) dan perselisihan wilayah pengelolaan kayu putih. Kewang juga sering terlibat dalam patroli pengawasan pesisir dan laut juga dilakukan bersama-sama dengan POKMASWAS
1	1. Strengthening Institutions and institutional customs of Buano Island	1.5	Draft of Village Regulation about natural resources management in Sout Buano Village	Rancangan peraturan Negeri tentang Pengelolaan wilayah Petuanan Negeri Buano Selatan telah diserahkan kepada Pemerintah Negeri dan BPD (Badan Perencanaan Desa) Buano Selatan untuk dibahas dan disahkan. Seluruh tahapan penyusunan mulai dari pelatihan, pengembangan materi peraturan negeri hingga uji publik dilakukan bersama pemerintah negeri Buano Selatan. Ranperneg dibuat berdasarkan aturan-aturan Soa tentang pengelolaan wilayah adat. Ranperneg ini memuat 7 bab dan 3 pasal, yang mengatur petuanan; Pemanfaatan kawasan hutan/pesisir; zonasi (termasuk daerah perlindungan laut tingkat Soa) dan sanksi. Rancangan awal peraturan negeri diserahkan kepada peserta dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapat masukan perbaikan. Keterlibatan aktif masyarakat mendorong terjadi peningkatan pengetahuan serta mengetahui isu-isu terkini terkait isu masyarakat Hukum Adat.

Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

- 1. Peraturan Negeri Tentang Perlindungan Kawasan Pesisir di Desa Buano Utara**
- 2. Rancangan Peraturan Negeri tentang Pengelolaan Petuanan di Negeri Buano Selatan**
- 3. Pedoman Kerja Kewang**
- 4. Pendokumentasian Kearifan lokal**
- 5. Survey Sosial dan ekonomi**
- 6. Hasil Pemetaan Partisipatif**
- 7. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pulau Buano Berkelanjutan berbasis kearifan lokal.**

LESSONS LEARNED

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings)
- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings)
- Any other lessons learned relevant to the conservation community

Aspek pelaksanaan program

- 1. Pengarusutamaan burung kehicap sebagai spesies karismatik Buano**
- 2. Pemetaan aktor, relasi, dinamika pengaruh kepentingan serta sosial di Pulau Buano dilakukan secara komprehensif**
- 3. Penguatan kapasitas dan oendmappingan institusi dan pejabat adat dilakukan secara kontinyu**
- 4. Merajut kepercayaan dan dukungan komunitas adat dari yang terkecil**
- 5. Pembentukan wilayah perlindungan dilakukan berbasis wilayah ulayat dan diperkuat hingga negeri**

Aspek kelembagaan LPPM

- 1. Evaluasi dan refleksi pelaksanaan program dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan**
- 2. CSTT dan Piranti membantu mengetahui posisi dan status lembaga secara objektif dan hasilnya digunakan untuk penguatan kelembagaan**
- 3. Memperdalam pengetahuan dan perluasan jaringan kerja-kerja konservasi dengan bekerja langsung bersama berbagai pemangku kepentingan dan organisasi.**
- 4. Mainstreaming civil society, Pemerintah kabupaten dan Provinsi menerima LPPM sebagai mitra sejajar. LPPM terlibat dalam berbagai POKJA terkait pengelolaan sumber daya alam di tingkat kabupaten dan provinsi**

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

- 1. Pelaksanaan program menjadi ajang rekonsiliasi dan konsolidasi antara masyarakat Buano Selatan dan Buano Utara yang terlibat dalam konflik 1983 akibat penetapan sasi tahun 1983 dan konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku tahun 2000-2003.**
- 2. Bagi pelajar, aktivitas program menjadi ajang pertemuan antara orang muda diluar institusi pendidikan, karena segregasi antara masyarakat Buano Selatan yang beragama Kristen dan Buano Utara yang beragama Islam, maka interaksi sosial dan perjumpaan kedua komunitas anak muda hanya terjadi pada wilayah pendidikan saja.**
- 3. Strategi pengelolaan Pulau Buano digunakan oleh pemerintah Kab. SBB dalam perencanaan pembangunan melalui review RPJMD dan RTRW Kab. SBB**

SAFEGUARDS

If not listed as a separate project component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental or pest management safeguards.

Terlaksana sesuai rencana

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF.

ADDITIONAL FUNDING

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment.

Total additional funding (US\$)

Type of funding

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)
- Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project)
- Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone number, email address) below.

**Nama: Noni Tuharea, Lembaga: LPPM Maluku, Alamat: Jl. Pitu Ina No. 24 RT/RW 001/01 Kelurahan Karang Panjang Ambon 97126; Telepon (+62911)349423
Handphone: +6281343299264, email: lppm_maluku@yahoo.com / nonithr@tutanota.com**